

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 Koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional, koperasi juga diharapkan dapat menempati tempat dan posisi yang penting. Koperasi Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat, yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.

Menurut Ryan *et al.*,(2020), Koperasi merupakan suatu badan usaha yang terdiri atas perkumpulan orang, dimana bersifat sukarela dengan tujuan ekonomi yang telah disepakati oleh anggotanya serta organisasinya yang dipimpin secara demokratis, serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini dibentuk bertujuan untuk dapat mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wadah perekonomian rakyat.

Koperasi menghadapi berbagai permasalahan dalam perkembangannya, misalnya dalam segi pembiayaan dan permodalan masih sulitnya koperasi untuk menghimpun dana dari anggota, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Hal ini disebabkan karena anggota atau masyarakat masih ragu dengan keamanan dananya yang tersimpan di koperasi dan koperasi juga masih sulit mengakses lembaga keuangan (perbankan) mengingat syarat yang ditetapkan cukup berat terutama masalah jaminan atau agunan dan syarat lainnya (Suwantari, 2014).

Menurut Hasibuan (2019), pengembangan usaha koperasi merupakan langkah untuk menjadikan suatu badan usaha menjadi besar dan maju. Di Indonesia, koperasi memiliki fungsi dan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam koperasi adanya hubungan kedekatan antara anggota keluarga agar terwujudnya harmonisasi pada koperasi, sehingga jika dalam hal pengambilan keputusan tentunya semua pihak pada koperasi ikut serta dalam menentukan keputusan yang diambil, bukan dari keputusan sepihak.

Tahun 2016 total koperasi yang terdapat di Bali adalah 4.696, jumlah koperasi aktif yang terdapat di Bali sejumlah 4.231 (Suryandari dan Novitasari, 2016). Perkembangan Koperasi pada Kecamatan Gianyar dari 254 Koperasi yang terdaftar di dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar yang aktif sebesar 171 Koperasi dan yang tidak aktif sebesar 83 Koperasi (07 Juli 2021, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar). Pada tahun 2019 ada beberapa nasabah salah satu Koperasi yang ada di Gianyar melakukan aksi unjuk rasa karena seorang ketua Koperasi yang membawa kabur dana nasabah sebesar Rp. 22 Miliar (NusaBali,2019).

Tahun 2020 seorang manajer koperasi di Gianyar dilaporkan ke Polres Gianyar, setelah terlibat kasus penggelapan dana Koperasi. Tersangka menggunakan dana deposito, tabungan nasabah, tabungan koperasi di bank, dan menggunakan nama debitur lain untuk meminjam uang agar dapat memenuhi kepentingan pribadinya yang mencapai Rp. 5 Miliar lebih, kasus ini terjadi pada Koperasi Griya Anyar Sari Boga yang beralamat di Jl. Dalem Rai, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (Tribun-Bali,2020). Dengan adanya kasus penggelapan dana nasabah menunjukkan lemahnya kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di Kecamatan Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh Culture (2018), menunjukkan bahwa pengendalian internal membantu organisasi memastikan keandalan laporan, seperti laporan keuangan yang membantu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, mendorong efisiensi dan efektivitas operasional, dan yang paling penting membantu dalam mengurangi risiko. Pengendalian internal juga membantu manajemen menghadapi peluang

dan ancaman eksternal seperti lingkungan yang kompetitif, volatilitas ekonomi dan permintaan dan pasokan yang berubah. Tujuan pengendalian internal adalah untuk mengurangi risiko dan kesalahan dan untuk meningkatkan akuntabilitas, karena menyediakan sistem *checks and balances*, dengan potensi untuk mengurangi pencurian dan penipuan. Pengendalian internal standar, seperti COSO, juga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal tergantung pada karakteristik organisasi.

Menurut Mulyadi (2017:129), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang digunakan untuk menjaga kekayaan perusahaan, memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi yang disajikan, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal adalah bagian dari manajemen risiko yang dijalankan oleh seluruh bagian dari suatu organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan dan menghindari adanya penyelewengan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.

Sistem pengendalian intern dalam koperasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakteristik koperasi dan kompetensi manajer. Karakteristik koperasi adalah ciri khas atau sesuatu yang membedakan antar koperasi, yang terdiri dari ukuran koperasi dan jenis koperasi. Sedangkan kompetensi manajer adalah keterampilan yang diperlukan seorang manajer yang ditunjukkan berdasarkan kemampuan dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam perusahaan, terdiri dari pengalaman manajemen dan tingkat pendidikan karyawan (Sari, 2015).

Sistem pengendalian intern dalam koperasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran koperasi, jenis koperasi, pengalaman manajemen, dan tingkat pendidikan karyawan. Menurut Wuryani (2020), Pengendalian internal mempengaruhi kinerja keuangan. Koperasi melakukan pengendalian intern, meliputi pandangan terhadap kegiatan koperasi, pengawasan organisasi dan usaha, pengawasan permodalan. Penelitian lembaga keuangan mikro tentang audit internal cukup tinggi dalam meminimalisir perilaku korupsi.

Sistem pengendalian dalam koperasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ukuran koperasi, jenis koperasi serta pengalaman kepengurusan dan manajemen (Suryandari & Novitasari, 2017). Ukuran koperasi dapat dilihat dari jumlah omzet pertahunnya. Koperasi besar memiliki kemungkinan yang besar untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang lebih baik daripada koperasi yang berukuran kecil. Salah satu yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian intern pada koperasi yaitu ukuran koperasi. Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan koperasi menjelaskan bahwa ukuran koperasi dapat dilihat berdasarkan omzet per tahun (volume usaha) yang dimuat dalam laporan perkembangan usaha. Berdasarkan omzetnya ukuran koperasi diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu koperasi besar, koperasi menengah, dan koperasi kecil. Koperasi yang berskala besar memiliki omzet yang besar pula.

Koperasi besar memiliki kemungkinan yang besar untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang lebih baik daripada koperasi yang berukuran kecil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwantari (2014) menunjukkan bahwa ukuran koperasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem pengendalian intern, hasil yang sama diungkapkan oleh Suryandari dan Novitasari (2016). Hasil berbeda diungkapkan oleh Sari (2015) dan Palupi (2011) yang menyatakan bahwa ukuran koperasi tidak berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian intern pada koperasi yaitu jenis koperasi. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 16 jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari lima jenis, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Berdasarkan perbedaan tersebut, tiap-tiap jenis koperasi dapat membedakan cara pengawasan atau pengendalian internnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwantari (2014), menunjukkan bahwa jenis koperasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem pengendalian intern, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) dan Hasmawati (2012) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa jenis koperasi tidak berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

Pengalaman manajemen merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan juga tidak terlepas dari tingkat

pendidikan yang dimiliki. Disamping itu, pengalaman kerja juga sangat diperlukan bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Pengalaman kerja adalah lama waktu karyawan bekerja di tempat kerja mulai saat diterima di tempat kerja hingga sekarang, (Hitalessy *et al.*, 2018).

Semakin berpengalaman manajemen maka akan dapat menghindari kecurangan yang dapat merugikan koperasi, karena koperasi merupakan organisasi ekonomi yang rawan akan risiko kerugian sehingga semakin berpengalaman manajemen dapat benar-benar menerapkan sistem pengendalian intern yang merupakan alat kontrol untuk kinerja koperasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwantari (2014) menunjukkan bahwa pengalaman manajemen berpengaruh positif terhadap kualitas pengendalian intern, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menunjukkan bahwa pengalaman manajemen tidak berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

Kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan karyawan. Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyatakan, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Wijatno, 2009).

Menurut Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan di capai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Menurut Mulyadi (2013:165), kualitas sistem pengendalian intern pada setiap organisasi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut. Sangat pentingnya peranan sumber daya manusia dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern karena walaupun suatu sistem yang dirancang dengan baik akan sia-sia begitu saja apabila tidak ditunjang dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang memadai. Khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yaitu tingkat pendidikan dari sumber daya manusia yang bersangkutan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) serta Mulihartini dan Muliarta (2016) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan karyawan berpengaruh positif terhadap kualitas sistem pengendalian intern. Penelitian tentang pengendalian intern pada koperasi sudah banyak dilakukan di wilayah Indonesia. Provinsi Bali sendiri juga sudah ada penelitian tentang sistem pengendalian intern. Bali merupakan provinsi koperasi yang berhasil di Indonesia. Secara umum pertumbuhan koperasi di Bali selama tahun 2014 mencapai peningkatan 3,2 persen pertahunnya dan untuk saat ini kondisi koperasi ditingkat nasional juga sangat baik. Hanya saja, reputasi itu belum diikuti dengan manajemen koperasi yang baik (Surya, 2015).

Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan (Hasibuan, 2008:69). Menurut Arismawati dkk., (2017) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal staf bagian keuangan atau akuntansi dan dengan latar belakang akuntansi akan sangat membantu dalam membuat laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Devi, dkk., (2017) bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh kuat terhadap kinerja para karyawan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan dengan baik, karena dengan pendidikan yang memadai pengetahuan dan keterampilan karyawan tersebut akan lebih luas dan mampu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi (Pangestu & Hastuti, 2021).

Hasil penelitian Sari, (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ukuran koperasi dan tingkat pendidikan karyawan. Namun sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap jenis koperasi dan pengalaman manajemen pada koperasi. Menurut Kiaritha dkk. (2014) sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dari manajemen organisasi dan landasan untuk operasi yang aman dan sehat. Sistem pengendalian internal yang kuat dapat membantu memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai, mencapai target jangka panjang dan pertumbuhan kinerja keuangan, (Barnabas, 2011). Pengendalian internal sebagai sistem pendeteksi dan pembetulan kesalahan. Teori ini relevan dengan penelitian karena menguraikan kebijakan pengendalian internal, prosedur, tindakan dan mitigasi yang harus diikuti dalam SACCO (Kariuki, 2017).

Menurut Arianti (2021), jika melihat banyaknya jumlah koperasi yang tersebar di Kabupaten Gianyar, dapat dilihat bahwa masyarakat masih memegang teguh sikap gotong royong dalam menjalankan perekonomian masyarakat (Kirana dan Saskara, 2017). Namun, hal tersebut tidak menghindarkan koperasi di Kabupaten Gianyar terlibat dalam kasus yang merugikan anggota koperasi sendiri. Permasalahan-permasalahan yang menghadang lajunya kehidupan Koperasi di antaranya menyangkut sumber daya manusia, kemampuan manajemen, serta keterbatasan permodalan.

Berdasarkan kasus yang terjadi di salah satu Koperasi yang ada di Kecamatan Gianyar, menunjukkan lemahnya sistem pengendalian intern pada Koperasi tersebut. Sistem pengendalian intern ini diperlukan untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai seberapa jauh dapat dipercayanya data akuntansi dalam koperasi tersebut. Oleh karena itu peneliti memilih melakukan penelitian di Kecamatan Gianyar agar dapat membantu memperkuat sistem pengendalian intern dalam Koperasi dengan mengangkat judul penelitian “Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi, Pengalaman Manajemen, dan Pendidikan Karyawan terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern pada Koperasi di Kecamatan Gianyar”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran koperasi berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di Kecamatan Gianyar?
2. Apakah jenis koperasi berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di Kecamatan Gianyar?
3. Apakah pengalaman manajemen berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di Kecamatan Gianyar?
4. Apakah tingkat pendidikan karyawan berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di Kecamatan Gianyar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran koperasi terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di Kecamatan Gianyar.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh jenis koperasi terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di Kecamatan Gianyar.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengalaman manajemen terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di Kecamatan Gianyar.
4. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pendidikan karyawan terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di Kecamatan Gianyar.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir di Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengaplikasikan teori dan praktek yang telah didapat pada bangku perkuliahan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu hasil studi empiris untuk memberikan pemahaman, gambaran dan wawasan mengenai pengaruh ukuran koperasi, jenis koperasi, pengalaman manajemen, dan pendidikan karyawan terhadap kualitas sistem pengendalian intern. Bagi Universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu akuntansi dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian intern, serta dapat mendorong koperasi yang ada di Kecamatan Gianyar lebih meningkatkan sistem pengendalian internnya sehingga dapat lebih dipercaya oleh masyarakat pada umumnya serta anggota pada khususnya dan dapat membantu Negara dalam meningkatkan perekonomian bangsa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Menurut Jansen dan Mackling (1976), teori agensi (*agency theory*) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agent pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan suatu amanah kepada *agents* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. *Agents* berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan oleh *principal* kepadanya. Wewenang dan tanggung jawab *principal* maupun *agents* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama (Sari,2015).

Menurut Baswir (2013 : 19) dalam Sari (2015), koperasi memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota memiliki hak untuk memberikan tugas kepada pengurus dan pengawas dalam koperasi, sebaliknya pengurus dan pengawas koperasi bertanggungjawab kepada rapat anggota. Berdasarkan teori keagenan tersebut maka dalam koperasi, rapat anggota merupakan *principal* dan pengurus dan pengawas koperasi adalah *agents*.

Menurut Rafika & Hamdan (2020), masalah dasar dalam *agency theory* yaitu adanya konflik kepentingan atau konflik agensi. Teori Agensi menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam hubungan antara “*principal*” (pemilik atau pemegang saham) dan “*agent*” (manajemen puncak).

Menurut Samudra *et al.*, (2020), Teori agensi atau teori keagenan adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen. Teori ini berpendapat bahwa nilai perusahaan tidak dapat dimaksimalkan jika insentif yang tepat atau pemantauan yang memadai tidak cukup efektif untuk menahan manajer perusahaan dari menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri (Amri, 2020). Dalam teori agensi ini memperlihatkan adanya pendelegasian dari prinsipal (*shareholder*) kepada manajer perusahaan untuk menjalankan perusahaan.

Tujuan utama teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Berdasarkan teori keagenan tersebut maka sistem pengendalian intern dirasa sangat penting bagi sebuah organisasi untuk menghindari konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agents*. Sistem pengendalian intern berfungsi untuk mengawasi tugas dan fungsi masing-masing unit bagian, sehingga setiap unit bagian memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan dapat mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atas tugas tiap fungsi (Palupi, 2011).

Menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2016:10) teori keagenan adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. Tujuan utama teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Teori keagenan dalam penelitian ini mengacu pada pentingnya kualitas sistem pengendalian intern guna untuk menghindari konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent*.

Koperasi memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari anggota, pengurus, pengawas dimana rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sistem pengendalian intern juga berfungsi untuk mengawasi tugas dan fungsi masing-masing unit bagian sehingga setiap unit bagian memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga dapat mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atas tugas tiap fungsi (Arianti,2021).

Koperasi memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas. Dalam hal ini pengendalian intern sangat diperlukan untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab setiap fungsi, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atas tugas tiap fungsi. Berdasarkan teori keagenan tersebut maka sistem pengendalian intern dirasa sangat penting bagi sebuah organisasi untuk menghindari konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Sistem pengendalian intern ini berfungsi untuk mengawasi tugas dan fungsi dari masing-masing bagian koperasi. Sehingga setiap bagian koperasi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.

2.1.2. Sistem Pengendalian Intern

1) Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan, sistem pengendalian intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.

COSO (*Comite of Sponsoring Organization*) mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses, dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel perusahaan, yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yang digolongkan menjadi dapat dipercayainya pelaporan keuangan, kepatuhan dengan hukum dan aturan yang berlaku, dan efisiensi dan efektivitas operasi (Mulyadi, 2014:163).

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pengendalian intern didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dengan tujuan untuk melindungi harta benda, meneliti ketepatan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisiensi operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan.

2) Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2014:163) tujuan pokok pengendalian intern sebagai yaitu menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Tujuan yang pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi yang baik. Tujuan ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administratif yang baik.

a) Pengendalian Administratif

Yaitu pengendalian yang ditunjukkan untuk mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutinya kebijakan perusahaan. Pengendalian administratif dapat berupa rencana organisasi serta prosedur-prosedur juga catatan-catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang membawa kepada tindakan pimpinan perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan itu merupakan titik tolak untuk menciptakan pengendalian atas transaksi.

b) Pengendalian Akuntansi

Pengendalian Akuntansi meliputi rencana organisasi serta prosedur-prosedur juga catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan dan dipercayainya catatan-catatan. Sehingga dalam pengendalian ini dilakukan penyusunan sedemikian rupa untuk meyakini bahwa :

- (1) Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau wewenang pimpinan, baik yang bersifat umum maupun khusus.

- (2) Transaksi dicatat sedemikian rupa sehingga memungkinkan dibuatnya ikhtisar-ikhtisar keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau kriteria lain yang sesuai dengan tujuan ikhtisar tersebut serta menekankan pertanggungjawaban atas harta perusahaan.
- (3) Penggunaan atas harta perusahaan (*access to assets*) diberikan hanya dengan persetujuan dan wewenang pimpinan.
- (4) Jumlah aktiva atau harta perusahaan seperti tercantum dalam akuntansi perusahaan dicocokkan dengan aktiva/harta yang ada pada waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya diambil jika terjadi perbedaan.

3) Komponen Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2014:166), dan COSO menyatakan adanya empat komponen pengendalian intern yang saling berkaitan, yaitu :

a) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian diri orang-orang yang ada didalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian terdiri dari beberapa faktor (Mulyadi, 2014 : 166), yaitu :

(1) Integritas dan nilai-nilai etika

Efektivitas pengendalian tidak dapat meningkat melampaui integritas dan nilai etika orang yang menciptakan, mengurus, dan memantaunya. Integritas dan nilai etika merupakan unsur pokok lingkungan pengendalian, yang mempengaruhi pendesainan,

pengurusan, dan pemantauan komponen lain. Integritas dan perilaku etika merupakan produk standar etika dan perilaku entitas, bagaimana hal itu dikomunikasikan, dan ditegakkan dalam praktik. Standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personil melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum, atau melanggar etika. Standar tersebut juga mencakup komunikasi nilai-nilai dan standar perilaku entitas kepada personil melalui pernyataan kebijakan dan kode etik serta dengan contoh nyata.

(2) Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan perpaduan antara intelegensia, keterampilan, dan pengalaman yang diminta untuk pengembangan kompetensi.

(3) Dewan komisaris dan komite audit

Komposisi dewan komisaris dan komite audit serta bagaimana mereka melakukan tanggungjawab pengawasan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dewan komisaris dan komite audit meliputi independensi mereka dari manajemen yang berkaitan dengan proporsi anggota dewan yang berasal dari luar, pengalaman, serta tingginya kedudukan mereka, ketepatan tindakan yang diambil, seberapa sulit pernyataan yang diajukan kepada manajemen, dan sifat serta luasnya interaksi dengan auditor intern maupun auditor ekstern.

(4) Falsafah manajemen dan gaya operasi

Banyak karakteristik yang membentuk falsafah manajemen dan gaya operasinya, dan memiliki dampak terhadap lingkungan pengendalian. Karakteristik tersebut meliputi : pendekatan untuk mengambil dan memonitor risiko bisnis, pendekatan pada kontak-kontak informal langsung dengan sistem kebijakan tertulis yang formal, indikator-indikator kinerja dan laporan laporan penyimpanan, kebiasaan dan tindakan terhadap pelaporan keuangan, pemilihan prinsip akuntansi alternatif yang tersedia secara konservatif atau agresif, kehati-hatian dan konservatif dalam mengembangkan taksiran-taksiran akuntansi.

(5) Strukur organisasi

Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuannya, karena struktur organisasi memberikan kerangka menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta pemantauan aktivitas perusahaan. Struktur organisasi perusahaan biasanya dituangkan dalam bentuk bagan organisasi yang secara tepat menggambarkan hubungan kewenangan dan pelaporan.

(6) Penetapan kewenangan dan tanggungjawab

Adanya perumusan kewenangan dan tanggungjawab akan membuat individu mengetahui bagaimana tindakannya berkaitan dengan pihak lain dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan dan untuk hal apa masing-masing individu harus bertanggungjawab.

(7) Kebijakan dan praktik dibidang sumber daya manusia

Efektif tidaknya struktur pengendalian intern akan sangat bergantung kebijakan dan praktik tentang sumber daya manusia yang dianut, yang akan menentukan apakah personil perusahaan memiliki tingkat integritas yang diharapkan, nilai-nilai etika, dan kompetensi. Praktik-praktik yang sehat mengenai hal ini menyangkut kebijakan rekrutmen yang baik serta proses skrining dalam pengangkatan karyawan, orientasi pegawai baru, kebijakan pelatihan, tindakan-tindakan pendisiplinan atas pelanggaran, evaluasi, konseling, dan program kompensasi yang memotivasi dan memberi penghargaan atas kinerja yang istimewa.

b) Perhitungan Risiko

Perhitungan resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah indentifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu perusahaan berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Perhitungan risiko oleh manajemen harus mencakup pertimbangan khusus untuk risiko yang bisa muncul akibat perubahan-perubahan yang terjadi, seperti adanya bidang usaha baru dengan transaksi-transaksi baru yang prosedur akuntansinya belum begitu dipahami, perubahan standar akuntansi, perubahan undang-undang, revisi atas sistem atau digunakannya teknologi baru dalam pengolahan informasi, perubahan cepat yang terjadi pada perusahaan sehingga pengolahan informasi dan fungsi pelaporan menjadi kewalahan, dan perubahan personil yang terlibat dalam pengolahan informasi dan fungsi pelaporan.

c) Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi perusahaan (termasuk pula kejadian-kejadian dan kondisi) dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan.

Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggungjawab masing-masing individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Komunikasi berarti meyakinkan bahwa personil yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan mengerti bagaimana kegiatan yang dilakukannya berkaitan dengan pekerjaan yang dikaukan orang lain, baik orang dari dalam maupun dari luar organisasi.

d) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang perlu telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian yang relevan pada suatu audit laporan keuangan bisa dikelompokkan dengan berbagai cara, yaitu :

(1) Review kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya; menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan *review* atas kinerja fungsional atau aktivitas, seperti *review* oleh manajer kredit, konsumen sebuah bank atas laporan cabang, wilayah, tipe pinjaman, tentang persetujuan dan pengumpulan pinjaman.

(2) Pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer*, dan lingkungan pemakaian akhir (*enduser*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi, adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

(3) Pengendalian fisik

Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files, dan perhitungan secara periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendali. Luasnya pengendalian fisik yang ditujukan untuk mencegah pencurian terhadap aktiva adalah relevan dengan keandalan penyusunan laporan keuangan, dan oleh karena itu relevan dengan audit. Sebagai contoh, pengendalian ini biasanya tidak relevan bila kerugian sediaan akan terdeteksi berdasarkan inspeksi fisik secara periodik dan dicatat dalam laporan keuangan. Namun, jika untuk tujuan pelaporan keuangan manajemen hanya semata-mata mempercayai *perpetual inventory records*, pengendalian keamanan fisik akan relevan dengan audit.

(4) Pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyalenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

4) Peraturan Untuk Sistem Pengendalian Intern Koperasi

Sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh pengawas, pengurus, dan manajemen koperasi untuk mengamankan kekayaan koperasi dan memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan informasi laporan pertanggungjawaban keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menunjang efektifitas dan efisiensi operasi.

Penunjang pelaksanaan pengendalian intern pada koperasi maka Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan peraturan menteri nomor 21 tahun 2008 tentang pedoman pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Objek pemeriksaan yang tertulis dalam peraturan ini meliputi lima aspek, yaitu aspek organisasi, aspek pengelolaan, aspek keuangan, produk dan layanan, serta aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan. Peraturan ini memberikan langkah-langkah kerja serta prosedur pemeriksaan bagi koperasi simpan pinjam dan semua jenis koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam di dalamnya.

5) Sistem Pengendalian Intern dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk

tujuan umum bagi pengguna eksternal. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diaudit sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usaha. Penggunaan SAK ETAP lebih mudah dalam implementasinya, tetapi tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Apabila tidak ada peraturan tertentu dalam SAK ETAP untuk transaksi maka entitas harus menetapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan handal bagi pemakai. Entitas yang menggunakan SAK ETAP harus secara eksplisit menyatakan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK ETAP dalam catatan laporan keuangan. Entitas diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan minimal satu kali dalam setahun. Pengendalian intern suatu entitas diperlukan untuk menjaga tingkat kepatuhan entitas serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam SAK ETAP.

Penggunaan SAK ETAP ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, dimana entitas tanpa akuntabilitas publik berdasarkan SAK ETAP bab 1 paragraf 1 adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

2.1.3. Pengertian Koperasi

Koperasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris "*Coperation*" yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "co" yang berarti bersama dan "*operation*" yang artinya bekerja. Secara keseluruhan koperasi berarti bekerja sama. Menurut pengertian umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 pasal 1 ayat 1 tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Pemahaman koperasi secara umum adalah suatu perkumpulan orang yang secara sukarela berjuang bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha yang dikelola secara demokratis (Lutfiaazahra, 2015).

Koperasi sebagai gerakan ekonomi yang tumbuh di masyarakat merupakan organisasi swadaya yang lahir atas kehendak, kekuatan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan tujuan, sasaran kegiatan serta pelaksanaannya. Keberadaan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan nilai yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Koperasi merupakan organisasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti BUMN/D atau organisasi pemerintah. Koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Fungsinya sebagai pencarian atau perolehan dana, koperasi berpegang pada prinsip swadaya artinya diupayakan modal berasal dari kemampuan sendiri yang ada dalam koperasi, namun apabila diperlukan dan dipandang mampu koperasi dapat mengambil dana dari luar.

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (Sisa Hasil Usaha) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota (Sari, 2018).

2.1.4. Ukuran Koperasi

Himpunan peraturan tentang perbankan, perkoperasian, usaha mikro, kecil, dan menengah (Keputusan Menteri Koperasi Nomor 351/KEP/M/XII/1998) menjelaskan bahwa ukuran koperasi dapat dilihat berdasarkan omzet per tahun (volume usaha) yang dimuat dalam laporan perkembangan usaha. Berdasarkan omzetnya ukuran koperasi diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu koperasi besar, koperasi menengah, dan koperasi kecil.

1. Koperasi besar mempunyai omzet (volume usaha) diatas Rp 1 Milyar dalam 1 (satu) tahun.
2. Koperasi menengah mempunyai omzet (volume usaha) antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 Milyar dalam 1 (satu) tahun.
3. Koperasi kecil mempunyai omzet (volume usaha) kurang dari Rp 500 juta dalam 1 (satu) tahun.

Ukuran koperasi dapat dilihat dari jumlah omzet per tahunnya. Koperasi yang berskala besar memiliki omzet yang besar pula. Oleh sebab itu, koperasi besar memiliki kemungkinan yang besar untuk menerapkan sitem pengendalian intern yang lebih baik daripada koperasi yang berukuran kecil. Semakin besar ukuran koperasi mencerminkan bahwa usaha yang dikelola koperasi semakin besar. Besarnya ukuran koperasi dapat berpotensi menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks. Untuk memecahkan masalah yang akibat kompleksnya transaksi yang ada sangat dibutuhkan sistem pengendalian intern. Semakin besarnya koperasi maka kualitas sistem pengendalian intern juga akan semakin baik dan terkontrol (Hasmawati, 2012).

2.1.5. Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 16 jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Jenis koperasi terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

2. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.

3. Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

4. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.

5. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Dasar untuk menentukan kelima jenis koperasi tersebut adalah kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka tiap-tiap jenis koperasi dapat membedakan cara pengawasan/pengendalian internnya serta membutuhkan sistem pengendalian intern yang sesuai untuk masing-masing aktivitas, kepentingan, dan kebutuhannya (Kertiasih, 2017).

2.1.6. Pengalaman Manajemen

Pengalaman kerja menurut Rinawati (2007), dikatakan sebagai proses pembentukan pengetahuan dan keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Sudarsono (2005), menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman tertentu sesuai sangat berguna dalam praktik mengurus koperasi. Pengalaman kerja manajemen akan mendukung keterampilan dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas manajemen sehingga tingkat kesalahan akan berkurang (Sari, 2018).

Pengalaman manajemen ditentukan dari lama waktu atau masa kerja manajemen. Lama waktu atau masa kerja di kategorikan menjadi tiga bagian yaitu jumlah manajemen yang masa kerjanya 0-5 tahun, diatas 5-10 tahun, dan diatas 10 tahun. Semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki oleh manajemen maka semakin terampil dan semakin cepat dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Sari, 2015).

Pengalaman manajemen koperasi indikatornya dilihat dari lama waktu/masa kerja yang dimiliki oleh manajemen koperasi untuk sistem pengendalian intern koperasi dan keberhasilan usaha koperasi. Faktor internal diantaranya adalah rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi, terutama pengalaman yang dimiliki oleh manajemen koperasi masih sangat terbatas (Rinawati, 2007).

2.1.7. Tingkat Pendidikan Karyawan

Menurut Mulyadi (2013:165), sangat penting peranan sumber daya manusia dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern karena walaupun suatu sistem yang dirancang dengan baik sia-sia begitu saja apabila tidak didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang memadai. Khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yaitu tingkat pendidikan dari sumber daya yang bersangkutan.

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyatakan, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Wijatno, 2009).

Menurut Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan di capai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari :

1. Pendidikan dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (Sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

2. Pendidikan menengah

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yang terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Menurut Sak-etap *et al.* (2017), dalam meningkatkan kinerja karyawan dalam bekerja adalah melalui pendidikan. Tingkat pendidikan yang ditempuh dan dimiliki oleh seseorang pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan dapat memperoleh kinerja yang baik. Menurut Sikula (2003), tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum.

Ikhsan (2005) tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Menurut Fahrudin dalam Liza dan Suktiarti (2013), dimensi dari tingkat pendidikan yaitu pendidikan formal dengan indikatornya pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah, dan pendidikan non formal dengan indikatornya pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh pekerja (Edy & Susila, 2016).

2.2. Penelitian Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran koperasi, jenis koperasi, pengalaman manajemen, dan tingkat pendidikan karyawan terhadap kualitas pengendalian intern yang sudah pernah dilakukan di antaranya:

Penelitian Arianti (2021), meneliti pengaruh ukuran koperasi, jenis koperasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa besar kecilnya koperasi (ukuran koperasi) dan jenis koperasi tidak berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern pada koperasi di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar. Sebaliknya variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian intern pada koperasi di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.

Penelitian Ryan *et al.* (2020), meneliti pengaruh penerapan asas kekeluargaan terhadap sistem pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan asas kekeluargaan sebagai sistem pengendalian internal pemberian kredit tetap berdasarkan hukum. Tetapi, dalam penerapannya, asas kekeluargaan

berlaku pada pembuatan perjanjian awal pengajuan pinjaman dan pemantauan serta pembinaan dalam pelunasan pinjaman. Dengan penerapan asas kekeluargaan tersebut dapat meminimalisir jumlah kredit macet di Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja.

Penelitian Hitalessy *et al.* (2018), meneliti pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Mandiri Tri Makmur. Teknik analisa data yang digunakan adalah kuesioner, dan pencatatan dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan, tingkat pendidikan terhadap pengalaman kerja, tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan, dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Mandiri Tri Makmur.

Penelitian Made *et al.* (2018), meneliti pengaruh ukuran koperasi, jenis koperasi, pengalaman kepengurusan manajemen terhadap kualitas sistem pengendalian intern. Teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran koperasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem pengendalian intern, jenis koperasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem pengendalian intern, dan pengalaman kepengurusan manajemen berpengaruh positif terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

Penelitian Mahendra & Ramantha (2018), meneliti pengaruh pelatihan kerja memoderasi pada ukuran koperasi, jenis koperasi, pengalaman manajemen dan tingkat pendidikan karyawan terhadap

efektivitas pengendalian internal. Pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan teknik analisis data yang digunakan yaitu *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada efektivitas pengendalian internal, pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian internal, pelatihan kerja memperkuat pengaruh tingkat pendidikan pada efektivitas pengendalian internal, serta pelatihan kerja tidak memoderasi pengaruh pengalaman kerja pada efektivitas pengendalian internal.

Penelitian Sari (2018), meneliti pengaruh karakteristik koperasi dan kompetensi manajer terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di Kabupaten Bangli. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan ukuran koperasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem pengendalian intern, jenis koperasi tidak berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern, pengalaman manajemen tidak berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern, dan tingkat pendidikan karyawan berpengaruh positif terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

Penelitian Suryandari & Novitasari (2017), meneliti pengaruh ukuran koperasi, jenis koperasi, pengalaman kepengurusan koperasi terhadap kualitas sistem pengendalian intern. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan ukuran koperasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem pengendalian intern, jenis koperasi berpengaruh terhadap kualitas

sistem pengendalian intern, dan pengalaman kepengurusan dan manajemen tidak berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

Penelitian Kertiasih *et al.* (2017), meneliti pengaruh tingkat pendidikan karyawan, jenis koperasi, dan ukuran koperasi terhadap kualitas sistem pengendalian intern. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan karyawan, jenis koperasi, dan ukuran koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

Penelitian Edy & Susila (2016), meneliti pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Mandiri Tri Makmur. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan, karyawan pada PT Mandiri Tri Makmur.

Penelitian Mulihartini dan Muliarta (2016), meneliti pengaruh tingkat pendidikan, variabel moderasi dalam penelitian ini adalah pengalaman kerja terhadap pengendalian internal. Teknik analisis menggunakan analisis regresi tanpa dan dengan variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif pada efektivitas pengendalian internal dan menemukan bahwa pengalaman kerja tidak mampu memoderasi hubungan tingkat

pendidikan pada efektivitas pengendalian internal koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung.

Penelitian Wirawan (2016), meneliti pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Mandiri Tri Makmur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah kuesioner, dan pencatatan dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian adalah tingkat pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Mandiri Tri Makmur.

Penelitian Sari (2015), meneliti pengaruh ukuran koperasi, jenis koperasi, pengalaman manajemen, dan tingkat pendidikan karyawan terhadap kualitas sistem pengendalian intern. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa ukuran koperasi, jenis koperasi dan pengalaman manajemen tidak berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern, sedangkan tingkat pendidikan karyawan berpengaruh positif terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

Penelitian Sutawan (2015), meneliti pengaruh stres kerja, motivasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan koperasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres kerja, motivasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, koperasi di Kabupaten Buleleng.

Penelitian Mustikasari (2015), meneliti pengaruh ukuran koperasi, jenis koperasi, dan tingkat pendidikan karyawan terhadap kualitas sistem pengendalian intern. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan jenis koperasi berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern sedangkan ukuran koperasi dan tingkat pendidikan karyawan tidak berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

Penelitian Panjaitan (2015), meneliti pengaruh *Good Governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja organisasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan *Good Governance* dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja dinas perindustrian, perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.

Penelitian Purdanti, dkk. (2014), meneliti pengaruh tingkat pendidikan karyawan terhadap kualitas sistem pengendalian intern. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pendidikan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

Penelitian Komala, dkk. (2014), meneliti pengaruh perbedaan ukuran koperasi dan jenis koperasi terhadap kualitas sistem pengendalian intern. Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis Kruskal-wallis. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan ukuran koperasi terhadap kualitas sistem pengendalian intern, tidak terdapat perbedaan jenis koperasi terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

Penelitian Suwantari (2014), meneliti pengaruh ukuran koperasi, jenis koperasi, serta pengalaman kepengurusan dan manajemen terhadap kualitas system pengendalian intern. Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran koperasi, jenis koperasi, serta pengalaman kepengurusan dan manajemen berpengaruh positif terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

Penelitian Hasmawati (2012), meneliti pengaruh ukuran koperasi dan jenis koperasi terhadap kualitas sistem pengendalian intern. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran koperasi mempengaruhi sistem pengendalian Internnya dan jenis koperasi tidak mempengaruhi sistem pengendalian intern koperasi.

Penelitian Palupi (2011), meneliti pengaruh ukuran koperasi dan jenis koperasi terhadap kualitas sistem pengendalian intern. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis anova (*two way anova*). Hasil dari penelitian menyatakan bahwa ukuran koperasi dan jenis koperasi tidak berpengaruh terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

(Ringkasan hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada lampiran 1)